

Efektivitas Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Rangka Menjaga Kerukunan Umat Beragama di Kota Jakarta Timur

¹ Rifqi Farhan Fadhilah,² Mawar,
Universitas Muhammadiyah Jakarta

ABSTRACT: The main role of Suku Badan Kesbangpol is to facilitate the coordination and integration of national and political activities so that the goal of building community harmony can be realized more effectively and efficiently through empowering the role of Suku Badan Kesbangpol. The effectiveness of the organization in this study uses 3 (three) indicators, namely based on goal achievement, integration and adaptation. The purpose of this study is to determine and analyze the effectiveness of Suku Badan Kesatuan Bangsa and Politik in maintaining religious harmony in East Jakarta and also to determine and analyze what factors are supporting and inhibiting it. The research method used is a descriptive method with a qualitative approach. Determination of informants in this study used a purposive sampling technique. The effectiveness of Suku Badan Kesatuan Bangsa and Politik can still be said to be ineffective. This is because the three indicators used to measure this effectiveness have not been fully achieved. The three indicators are goal achievement, integration and adaptation. The achievement of goals carried out by Suku Badan Kesatuan Bangsa and Politik can be said to be effective because it goes through a series of processes in achieving goals. The integration indicator is still less effective, this can be seen from the occurrence of several conflicts that are still occurring in East Jakarta. The National Unity and Politics Agency is still not effective in countering the SARA issues that occur, meaning that the socialization carried out still needs to be improved. In the adaptation indicator, it is known that the East Jakarta National Unity and Politics Agency has been able to align various changes that occur in society, meaning that this adaptation indicator can be said to be effective.

Keywords: Organizational Effectiveness, Tolerance, Interfaith Harmony

ABSTRAK : Peran utama Suku Badan Kesbangpol adalah memfasilitasi koordinasi dan integrasi kegiatan kebangsaan dan politik sehingga tujuan terbangunnya kerukunan masyarakat bisa direalisasi secara lebih efektif dan efisien melalui pemberdayaan peran Suku Badan Kesbangpol. Efektivitas organisasi dalam penelitian ini menggunakan 3 (tiga) indikator yaitu berdasarkan pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam menjaga kerukunan umat beragama di Jakarta Timur juga untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambatnya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Efektivitas Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik masih dapat dikatakan belum efektif. Hal ini dikarenakan ketiga indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas ini belum sepenuhnya tercapai. Ketiga indikator tersebut yaitu pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi. Pencapaian tujuan yang dilakukan oleh Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat dikatakan sudah efektif karena melalui serangkaian proses dalam pencapaian tujuan. Pada indikator integrasi masih kurang efektif, hal ini dapat diketahui terjadinya beberapa konflik yang masih terjadi di Jakarta Timur. Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik masih belum efektif menangkal isu SARA yang terjadi, artinya sosialisasi yang dilakukan masih perlu ditingkatkan lagi. Pada indikator adaptasi, diketahui bahwa Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jakarta Timur sudah mampu menyelaraskan berbagai perubahan yang terjadi di masyarakat, artinya indikator adaptasi ini sudah dapat dikatakan efektif.

Kata Kunci: Efektivitas Organisasi, Toleransi, Kerukunan Antar Umat Beragama

1. PENDAHULUAN

Kerukunan umat beragama menjadi kunci terpenting dalam menjaga toleransi, saling pengertian, saling menghormati, dan saling menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam wadah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD NKRI Tahun 1945. Berbagai kasus-kasus ketidakrukunan umat beragama seringkali terjadi, hal tersebut merupakan salah satu hambatan menuju negara maju. Agama merupakan salah satu bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM)

yang harus dihormati dan dilindungi oleh undang-undang. Pada Pasal 29 Ayat 1 dan 2 UUD NKRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu (Purwo Handoko, 2020).

Sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 bahwa Pemeliharaan kerukunan umat beragama di tingkat provinsi menjadi tugas dan kewajiban gubernur, karena kerukunan umat beragama merupakan bagian penting dari kerukunan nasional. Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 258 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta, Suku Badan mempunyai tugas mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis pelayanan penunjang pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang meliputi bina ideologi dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan, ketahanan ekonomi, seni, budaya, agama dan kemasyarakatan serta politik dan demokrasi.

Masyarakat kota Jakarta dikenal dengan masyarakat yang majemuk. Kota Jakarta merupakan tempat pertemuan manusia dengan berbagai perbedaan mulai dari latar belakang agama, sosial, budaya hingga politik. Menurut data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta tahun 2020-2022, jumlah masyarakat Jakarta yang beragama Islam sebanyak 83,68%, Kristen, 8,60%, Katolik, 3,93%, Buddha 3,59 % Hindu 0,93% dan Khonghucu 0,02%. Data tersebut menerangkan bagaimana Jakarta dinilai sebagai kota yang heterogen. Dari proses dan perjalanan yang panjang, bagaimana perbedaan latar belakang tersebut masyarakat Jakarta terbiasa untuk saling berinteraksi dan hidup berdampingan. Tentunya, suasana rukun, aman dan damai menjadi dambaan seluruh masyarakat Jakarta tanpa adanya konflik, gangguan serta kesenjangan-kesenjangan lainnya.

Badan Kesbangpol dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah tentunya harus mengetahui dan bertanggung jawab memfasilitasi penyelesaian konflik yang terjadi di wilayah kerjanya. Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 258 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta, Suku Badan mempunyai tugas mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis pelayanan penunjang pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang meliputi bina ideologi dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan, ketahanan ekonomi, seni, budaya, agama dan kemasyarakatan serta politik dan demokrasi. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi Jakarta mempunyai beberapa fungsi, Adapun fungsi

yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama yaitu: 1). Fasilitasi penyelenggaraan pembinaan pemahaman ideologi negara dan pengembangan wawasan kebangsaan pada lingkup Kota Administrasi; 2). Fasilitasi penyelenggaraan pengembangan ketahanan ekonomi, seni, budaya, agama dan kemasyarakatan pada lingkup Kota Administrasi. Tujuan Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merawat kerukunan hidup beragama adalah membuat masyarakat menjadi harmonis, saling menghormati, dan menghargai satu sama lain.

Adapun program dari Suku Badan Kesbangpol dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Tujuan, Sasaran dan Strategi Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Tujuan	Sasaran	Program
1	Mewujudkan Jakarta sebagai kota dengan persatuan dan kesatuan masyarakat yang kokoh melalui budaya multikultur dengan mengembangkan aspek- aspek kebangsaan dan keberagaman	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pembagunan persatuan dan kesatuan masyarakat yang kokoh melalui budaya multikultural dengan mengembangkan aspek-aspek kebangsaan dan kebinekaan	Program Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
2	Meningkatkan pendidikan politik masyarakat Jakarta dengan tingkat partisipasi politik yang tinggi dalam iklim yang demokratis dan kondusif	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan politik dengan tingkat partisipasi politik yang tinggi dalam iklim yang demokratis dan kondusif	Program Penguatan Pembinaan Politik Masyarakat

Sumber: Rencana Strategis Bakesbangpol, 2024

Dari tabel di atas diketahui bahwa terdapat 2 (dua) program dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang telah dijalankan yaitu: Program Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa, Program Penguatan Pembinaan Politik Masyarakat. Dengan kedua program di atas diharapkan tidak terjadi konflik di wilayah Jakarta khususnya di Jakarta Timur.

Dari hasil observasi penulis, terdapat beberapa konflik yang terjadi yang menyebabkan program tersebut menjadi kurang efektif pada pelaksanaannya. Seperti yang dikutip dari parahyangan-post.com salah satu konflik yang terjadi mengenai Warga Pondok Kelapa menolak lahan ruang terbuka hijau (RTH) dibangun Gereja Presbyterian Indonesia (parahyangan-post.com, diakses April 2024). Penolakan warga terkait kegiatan peribadatan yang mengatasnamakan Gereja Presbyterian Indonesia Jemaat Sola Gratia yang dilakukan pada tempat yang disewa dari Yayasan Bahtera Sejahtera yang berlokasi di Kelurahan Pondok Kelapa Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur.

Dari hasil penelusuran yang dilakukan oleh Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi Jakarta Timur permasalahan tersebut dikarenakan alih fungsi dari tujuan awal untuk mendirikan Sekolah Taman Kanak-Kanak, yang pada waktu selanjutnya gedung

Sekolah TK tersebut dialih fungsikan menjadi Tempat Peribadatan/ Gereja Presbyterian Indonesia Jemaat Solo Gratia. Walikota Administrasi Jakarta Timur telah mengeluarkan surat pemberitahuan untuk penghentian penggunaan kegiatan di Gedung TK. Yayasan Bahtera yang tidak sesuai peruntukannya. Sejak 2004 kegiatan di lokasi tersebut sudah vakum. Perwakilan warga meminta kepada Lurah Pondok Kelapa untuk segera mengambil tindakan, agar kegiatan peribadatan yang meresahkan warga tersebut tidak memicu permasalahan lebih lanjut, karena Pengurus Gereja telah melibatkan oknum Ormas sebagai pengamanan pada saat melakukan peribadatan, sehingga warga merasa terintimidasi dengan hal tersebut. Dengan terjadinya konflik tersebut, tindakan nyata yang dilakukan oleh Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi Jakarta Timur beserta Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yaitu dengan mengadakan Rapat Koordinasi yang melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan (<https://www.parahyangan-post.com/berita/detail/gereja-di-pondok-kelapa-jaktim-ditolak-warga>, 2024)

Selain konflik di atas, terdapat berbagai masalah kerukunan hidup beragama di Wilayah Jakarta Timur. Isu sensitif terkait agama dan politik identitas menguat dan merasuki masyarakat sehingga tatanan sosial masyarakat Indonesia yang ramah, santun, suka damai dan rukun dirusak oleh perilaku kekerasan, kerusuhan, aksi radikalisme, perusakan rumah ibadah, bahkan terorisme. Ada kecenderungan dan fakta yang dominan bahwa masyarakat lebih mudah memilih kekerasan sebagai solusi konflik dari pada jalan damai ketika agama dibawa dalam ranah konflik (Yohanes, 2023). Beberapa konflik yang terjadi akan mengganggu efektivitas Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam menjalankan programnya dalam mewujudkan kerukunan umat beragama di Jakarta Timur.

Pada penelitian ini, hanya membatasi mengenai sejauh mana efektivitas Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam mewujudkan kerukunan umat beragama di wilayah Jakarta Timur, dimana ditemukan beberapa konflik seperti penolakan warga terkait kegiatan peribadatan, memastikan kekuatan hukum mengenai legalitas pendirian gereja dengan Ormas yang menjadi backing (Pemuda Batak Bersatu dan Pemuda Pancasila) akan ditindak lanjuti dengan pemanggilan untuk klarifikasi. Selain itu Pemerintah Kota Jakarta Timur menggaungkan peningkatan kerukunan umat beragama di tengah ancaman politisasi isu tersebut menjelang Pemilu 2024. Seperti yang dikutip oleh antaranews.com “"Kami komit untuk terus mendorong penguatan moderasi beragama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara," kata Wakil Wali Kota Jaktim Iin Mutmainah saat mengikuti Seminar Daring "Peningkatan Kerukunan Umat Beragama Jakarta Timur 2023". Dengan adanya kegiatan itu, sebutnya, diharapkan adanya wawasan dalam pencegahan untuk tidak

menimbulkan perpecahan atau friksi di masyarakat. Efektivitas organisasi dalam penelitian ini menggunakan 3 (tiga) indikator yaitu berdasarkan pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi. Dengan demikian yang menjadi fokus dan tujuan dari penelitian ini adalah efektivitas Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam rangka mewujudkan kerukunan umat beragama di Kota Jakarta Timur.

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut:

- a. Terjadinya konflik terkait kerukunan umat beragama dalam kasus alih fungsi sekolah menjadi tempat ibadah.
- b. Pemerintah Kota Jakarta Timur menekankan peningkatan kerukunan umat beragama di tengah ancaman politisasi isu menjelang Pemilu 2024 di wilayah Jakarta Timur
- c. Terdapat masyarakat yang kurang menyadari pentingnya kerukunan umat beragama.

Berikut adalah beberapa pengertian dari teori yang diambil dalam penelitian ini:

Efektivitas Organisasi

Efektivitas merupakan kemampuan atau tingkat keberhasilan suatu program serta tindakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks organisasi atau bisnis, efektivitas dapat diukur dengan seberapa baik organisasi tersebut mencapai tujuannya dalam hal pencapaian hasil yang diinginkan. Dalam konteks individu, efektivitas dapat diukur dengan seberapa baik seseorang dapat mencapai tujuan atau tugas yang diberikan dengan sumber daya yang tersedia.

Menurut (James L Gibson et al.,1985) seperti yang dikutip oleh Pasolong, efektivitas adalah pencapaian sasaran dari upaya bersama (Pasolong, 2013). Lebih lanjut James menambahkan bahwa derajat pencapaian sasaran menunjukkan derajat efektivitas, sehingga dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah pencapaian tujuan. Semakin mudah organisasi mencapai tujuan menunjukkan bahwa organisasi tersebut berjalan efektif. Menurut Gibson, konsep efektivitas organisasi dapat dipandang melalui tiga hal yaitu efektivitas individu, kelompok, dan organisasi (Gibson et al., 1985).

Pada efektivitas individu, hal yang kemudian ditekankan adalah pelaksanaan tugas-tugas dan tanggung jawab individu sebagai pekerja dari suatu organisasi. Keberhasilan atau prestasi seorang individu sangat berkaitan dengan kerja kolaboratif dalam kelompok, karena dalam suatu organisasi seorang individu pasti akan berhubungan langsung dengan kelompoknya dalam bekerja. Efektivitas kelompok menekankan pada kinerja tim dimana suatu tugas bersama yang seharusnya dikerjakan secara kelompok dan bukan perorangan. Efektivitas organisasi

secara perseptual merupakan hasil efektivitas antara individu dan kelompok atau dengan kata lain tingkat prestasi yang ditonjolkan adalah tingkat prestasi organisasi yang merupakan gabungan dari prestasi individu dan kelompok.

Ukuran efektivitas dapat ditentukan melalui tiga hal (Duncan dalam Steers, 2015), yaitu:

- (1) pencapaian tujuan,
- (2) integrasi, dan
- (3) adaptasi.

Pencapaian tujuan dipandang sebagai suatu proses dalam upaya mencapai tujuan, sedangkan integrasi merupakan pengukuran yang dilakukan terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi, dan adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya (Duncan, 1973).

Menurut Duncan ada tiga elemen dasar dalam membangun efektivitas organisasi yaitu produktivitas (*productivity*), tekanan organisasi (*intra organizational stress*), dan fleksibilitas (*flexibility*). Produktivitas organisasi terkait dengan efisiensi, sedangkan tekanan organisasi dibuktikan melalui hasil pengamatan tingkat ketegangan dan konflik dalam suatu organisasi, dan fleksibilitas terkait dengan kemampuan organisasi menyesuaikan diri dengan perubahan eksternal dan internal.

Steers mengembangkan model proses efektivitas yang mencakup tiga dimensi (Steers, 1975). Yakni (1) optimalisasi tujuan, dimana masing-masing tujuan organisasi mendapat perhatian dan sumber daya yang cukup, (2) perspektif sistem terbuka yang mengakui pentingnya interaksi antara organisasi dan lingkungan, (3) pentingnya perilaku manusia dalam mencapai kinerja organisasi.

Efektivitas organisasi dapat diketahui dari bagaimana peran penting dari Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dimana dari sisi teori Duncan adalah peran keseimbangan (*equilibrium*) dalam organisasi dan kepemimpinan. Peran Suatu organisasi berperan efektif bila memenuhi tiga hal utama yaitu (1) melakukan pengorganisasian secara efisien, (2) menjaga keseimbangan dalam struktur sosial, dan (3) tetap fleksibel atau adaptif dengan perubahan. Peran ini dapat menjelaskan efektivitas Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang perlu memiliki kapasitas dan kemampuan dalam menciptakan korelasi sub-sub sistem sosial antar pribadi dan kelompok dalam masyarakat (Duncan, 1973). Maksud dan fungsi dan peran *equilibrium* tersebut adalah Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik harus bisa membuat integrasi diantara subsub sistem, atau interaksi dan komunikasi antar unit dan bidang, komponen dalam lingkup pemerintahan dan masyarakat. Peran keseimbangan oleh Suku

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah kemampuan dalam menyatukan individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, dan kelompok dengan masyarakat sehingga terciptanya harmonisasi semua elemen masyarakat.

Menurut (Ritzer & Goodman, 2010:121) adaptasi adalah sebuah sistem untuk mengatasi permasalahan yang bersifat eksternal, genting, mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan dan kebutuhannya. Adaptasi juga berkaitan dengan kemampuan suatu organisasi dalam mencapai tujuan (*goal attainment*) yakni sebuah sistem yang menuntun organisasi mencapai tujuan utamanya dan mampu mendefinisikan tujuannya. Keseimbangan juga terbangun dari adanya proses integrasi (*integration*) yaitu sebuah sistem yang menghubungkan antara komponen yang satu, atau unit yang satu dengan unit lainnya sehingga unit-unit mampu mengelola fungsinya masing-masing untuk mencapai tujuan bersama.

Dari beberapa teori, teori Duncan sangat cocok digunakan sebagai pisau analisis pada penelitian ini. Menurut Duncan dalam Steers (2015) dalam bukunya "Efektivitas Organisasi" mengatakan efektivitas dapat diukur dari indikator sebagai berikut:

a. Pencapaian tujuan.

Pencapaian tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Pencapaian tujuan terdiri dari faktor-faktor, yaitu: (1) kurun waktu pencapaiannya ditentukan, dan (2) sasaran merupakan target yang konkrit, dan (3) dasar hukum.

b. Integrasi

Integrasi adalah pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi terdiri dari beberapa faktor, yaitu: (1) prosedur, dan (2) proses sosialisasi.

c. Adaptasi

Adaptasi adalah pengukuran bagaimana sebuah organisasi mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kemampuan adaptasi merupakan kemampuan untuk mengubah atau menyelaraskan prosedur standar operasinya secara dinamis apabila lingkungannya mengalami perubahan. Dengan demikian adaptasi adalah proses penyesuaian diri yang dilakukan untuk menyelaraskan suatu individu terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungannya. Adaptasi terdiri dari beberapa faktor, yaitu: (1) peningkatan kemampuan, dan (2) sarana dan prasarana

Konsep Kerukunan Masyarakat

Peraturan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No.9 dan Tahun 2006, pasal 1 angka (1) menjelaskan makna kerukunan, yaitu kerukunan antarumat beragama adalah situasi atau keadaan suatu hubungan umat yang berbeda agama dengan dilandasi sikap dan pikiran toleransi, saling memahami, menghormati, menghargai kesetaraan didalam mengamalkan agamanya dan kerjasama dalam kehidupan sosial, berbangsa dan bernegara. Pengertian ini menggambarkan bahwa kerukunan antarumat beragama tidak saja mencapai suasana batin yang penuh toleransi keberagaman, akan tetapi juga bagaimana cara mereka dapat saling bekerjasama (Ahmad Subakir, 2020:19).

Kerukunan diidealkan sebagai kondisi hidup dan kehidupan yang mencerminkan suasana damai, tertib, tentram, sejahtera, hormat menghormati, harga menghargai, tenggang rasa, gotong royong sesuai dengan ajaran agama dan kepribadian Pancasila. Kerukunan hidup umat beragama juga mengupayakan hadirnya sebuah tatanan sosial yang baik dimana semua golongan agama dapat hidup bersama-sama secara damai tanpa mengurangi hak dan kebebasan masing-masing, untuk menganut dan melaksanakan kewajiban agamanya.

Dalam kemajemukan semua orang dapat hidup bersama tanpa ada kecurigaan, dimana tumbuh sikap saling menghormati dan bersedia berkerja sama dan berkolaborasi demi kepentingan bersama. Hakekat kerukunan adalah bagaimana setiap warga negara memiliki sikap toleran, menghargai, damai, santun, tenggang rasa yang muncul dari lubuk hati yang paling dalam, kemudian terpancar dari kemauan untuk berinteraksi satu sama lain sebagai manusia tanpa tekanan dari pihak manapun (Ismail, 2019). Dalam mengembangkan sikap dan perilaku yang rukun dan damai setiap warga memiliki tanggung jawab yang sama. Baik individu, kelompok dan organisasi kemasyarakatan (ormas) atau lembaga sosial masyarakat memiliki peran dan kontribusi yang sama dalam menjaga dan memelihara kerukunan masyarakat. Organisasi kemasyarakatan memiliki peran yang lebih strategis dalam pembangunan demokrasi di Indonesia.

Organisasi sosial dan kemasyarakatan sebagai perwakilan suara masyarakat perlu bermitra dan berkolaborasi dengan pemerintah melalui Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai institusi pemerintahan yang berperan melakukan fungsi pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan. Proses pembinaan sosial politik dan organisasi kemasyarakatan bertujuan untuk mengatasi konflik yang mungkin timbul akibat interaksi sosial maupun konflik antar kelompok sosial, partai politik dan organisasi kemasyarakatan.

Dalam menjaga dan memelihara kerukunan masyarakat dan antar umat beragama di Indonesia maka perlu didorong upaya-upaya strategis di tiga wilayah kerukunan yakni (1)

kerukunan intern umat beragama, (2) kerukunan antar umat yang berbeda-beda agama, dan antara pemuka atau tokoh agama, (3) kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah melalui penguatan dasar-dasar kerukunan internal antar umat beragama, antar tokoh-tokoh agama dan masyarakat dan antara umat beragama dengan pemerintah sehingga terbentuk suatu harmonisasi kebersamaan dalam keberagaman. Membangun harmoni sosial dan persatuan nasional dengan mendorong seluruh umat beragama untuk hidup rukun dalam upaya kemanusiaan dan demokrasi dan menunjung toleransi. Menciptakan suasana kehidupan beragama yang kondusif dalam rangka memantapkan penghayatan agama setiap warga masyarakat serta pengamalan agama yang mendukung bagi pembinaan kerukunan hidup intern dan antar umat beragama. Melakukan eksplorasi dan gerakan kemanusiaan berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan universal yang diperkuat oleh spiritualitas dari masing-masing agama.

Antisipasi adalah salah satu dimensi pertama dalam ketahanan organisasi. Kemampuan antisipasi menggambarkan kapabilitas organisasi dalam melakukan pencegahan terhadap berbagai gangguan dan konflik (Yohanes, 2023:120). Antisipasi juga terkait dengan kemampuan mendeteksi perkembangan kritis suatu organisasi terhadap lingkungannya, serta bagaimana organisasi beradaptasi secara proaktif mencegah dan meminimalisir gangguan. Ini tidak berarti bahwa organisasi yang tangguh dapat mencegah setiap kegagalan atau krisis karena konflik atau krisis tidak pernah mengumumkan kedatangannya (Teixeira & Werther Jr., 2013).

Organisasi dan lembaga yang memiliki kapasitas dan kemampuan antisipatif yang baik dapat melihat dan menemukan hal atau kejadian yang tidak terduga dengan cara yang lebih cepat daripada yang lain. Organisasi yang memiliki kemampuan antisipasi yang baik dapat secepatnya bereaksi terhadap perubahan, sementara organisasi yang lain masih menunggu dan melihat. Sistem organisasi yang baik membutuhkan kemampuan antisipasi untuk menghindari situasi yang mengancam atau setidaknya meminimalkan potensi konsekuensi negatif yang lebih besar. Model organisasi seperti ini mendefinisikan antisipasi sebagai “kemampuan untuk melihat ke bawah, untuk menentukan bagaimana lingkungan dan orang-orangnya berubah pandangannya untuk membuat keputusan serta mengambil tindakan di masa sekarang serta mempromosikan hasil yang diinginkan maupun menghindari gangguan di masa depan (Yohanes, 2023).

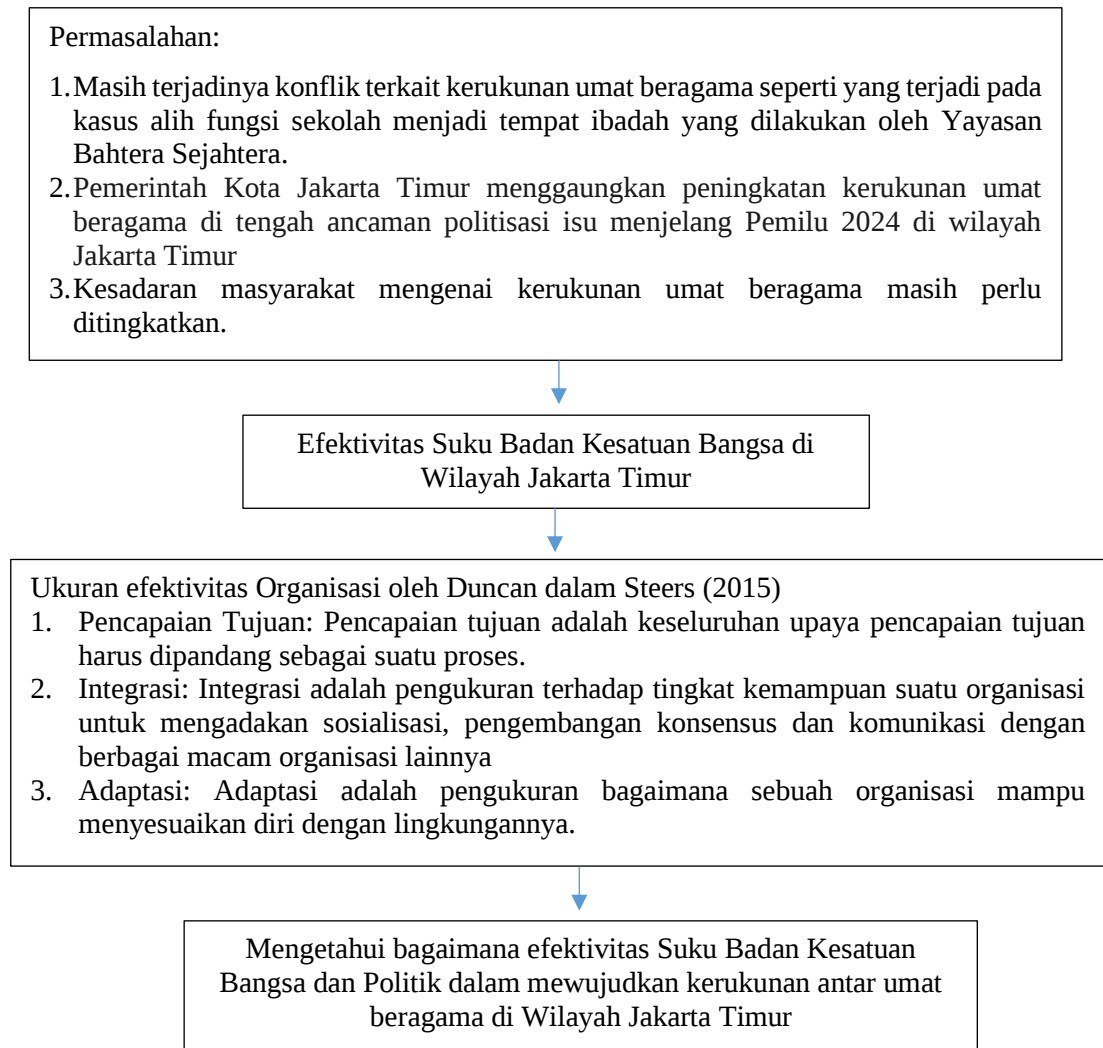
Dalam penelitian Yohanes (2023) ditemukan bahwa ada tiga tahap antisipasi yang perlu dimiliki oleh suatu organisasi seperti Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang terdiri dari tiga kemampuan khusus: (1) kemampuan identifikasi untuk mengamati perkembangan internal dan eksternal, (2) kemampuan untuk mengidentifikasi perkembangan kritis dan potensi

ancaman, (3) kemampuan melihat sejauh mungkin untuk mempersiapkan kejadian yang tidak terduga. Kemampuan antisipasi Kesbangpol dalam membangun potensi ketahanan yang dapat didefinisikan sebagai ketahanan yang saat ini belum terbukti atau terwujud artinya satu ketahanan antisipatif untuk membangun fondasi respons efektif terhadap situasi kritis. Kemampuan seperti ini sudah dilakukan dengan baik melalui kemampuan Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan aparat pemerintah daerah dan pihak keamanan dan tokoh masyarakat dan agama mencegah perluasan konflik dan tindakan kekerasan. Kemampuan antisipatif ini mewujudkan ketahanan yang mampu memberikan kontrol pada situasi tertentu dan tindakan, penyesuaian, serta keputusan penting harus dilakukan secara *real time*.

Kerangka Pikir Penelitian

Menurut Sugiyono (2019:95) kerangka berpikir merupakan konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagaimana masalah yang penting. Peran Suatu organisasi berperan efektif bila memenuhi tiga hal utama yaitu (1) melakukan pengorganisasian secara efisien, (2) menjaga keseimbangan dalam struktur sosial, dan (3) tetap fleksibel atau adaptif dengan perubahan. Peran ini berarti Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik perlu memiliki kapasitas dan kemampuan dalam menciptakan korelasi sub-sub sistem sosial antar pribadi dan kelompok dalam masyarakat (Duncan, 1973).

Dalam penelitian ini, fokus yang diteliti adalah efektivitas Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam rangka mewujudkan kerukunan umat beragama serta faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam rangka mewujudkan kerukunan umat beragama di Jakarta Timur. Maka untuk mengetahui bagaimana efektivitas Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam rangka menjaga kerukunan umat beragama, penelitian ini menggunakan teori menurut Duncan yang secara eksplisit menerangkan efektivitas organisasi diukur dari 3 (tiga) indikator yaitu: pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi, dimana dari ketiga indikator ini akan diketahui sejauh mana efektivitas dari Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam menjaga kerukunan umat beragama di wilayah Jakarta Timur.



Gambar 1 Kerangka Pikir Penelitian

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2019) metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif. Menurut Bogdan dan Biklen dalam Sugiyono (2019:7) metode penelitian kualitatif deskriptif adalah pengumpulan data yang berbentuk katakata atau gambar-gambar, sehingga tidak menekankan pada angka. Data yang terkumpul setelah dianalisis selanjutnya dideskripsikan sehingga mudah dipahami oleh orang lain. Dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran, menguraikan dan menafsirkan keadaan yang ada terkait peran Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam rangka

menjaga kerukunan umat beragama di Kota Jakarta Timur. Penulis juga ingin memaparkan mengenai Faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam rangka menjaga kerukunan umat beragama di Jakarta Timur yang dilakukan oleh Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* atau sampling bertujuan. Sampling bertujuan adalah suatu “strategi jika seseorang menginginkan agar dapat memahami sesuatu mengenai kasus-kasus terpilih tertentu tanpa membutuhkan (atau berhasrat) untuk menggeneralisasi kepada semua kasus seperti itu”. Peneliti menggunakan *purposive sampling* untuk meningkatkan kegunaan informasi yang diperoleh dari sampel yang sedikit. Sampling bertujuan membutuhkan informasi yang diperoleh atau diketahui itu dalam fase penghimpunan data awal mengenai variasi di antara sub-sub unit sebelum sampel dipilih.

Peneliti pada mulanya menelusur informan, kelompok-kelompok, tempat-tempat, atau peristiwa-peristiwa kunci yang mempunyai informasi yang cukup banyak dari mereka, sub-sub unit dipilih untuk kajian yang lebih dalam. Dengan perkataan lain, sampel-sampel ini dapat dipilih karena kemungkinan merekalah yang mempunyai pengetahuan banyak dan informatif mengenai fenomena yang sedang diinvestigasi oleh peneliti.

Adapun yang akan menjadi informan adalah:

Tabel 2. Informan Penelitian

No.	Informan	Jabatan	Jumlah
1	Informan 1	Kasubab Kesbangpol Jakarta Timur	1 orang
2	Informan 2	Analisis Kebijakan Sub Kelompok Urusan Ketahanan Ekonomi Seni Budaya Agama & Kemasyarakatan	1 orang
3	Informan 3	Ketua FKUB Jakarta Timur	1 orang
4	Informan 4	Tokoh Agama Islam	2 orang
5	Informan 5	Tokoh Agama Nasrani	2 Orang
6	Informan 6	Akademisi	1 Orang
Total Informan			8 Orang

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa bentuk studi pendekatan yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi.

Pemeriksaan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan teknik triangulasi. Triangulasi merupakan merupakan teknik pengumpulan data yang sifatnya menggabungkan berbagai data dan sumber yang telah ada (Sugiyono 2015:83). Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar – benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Teknik triangulasi metode

dalam penelitian ini digunakan dengan cara membandingkan data yang diperoleh dari hasil wawancara terhadap informan dengan dokumen-dokumen yang berkaitan tentang efektivitas Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Jakarta Timur.

Penelitian ini menggunakan model analisis data yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga hal utama/alur kegiatan yang akan dilaksanakan dari awal hingga selesai, yaitu: reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) dan penarikan kesimpulan (*conclusion; drawing/ verification*). Terjadi secara bersamaan berarti reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/ verifikasi sebagai sesuatu yang saling jalin menjalin merupakan proses siklus dan interaksi pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk sejajar yang membangun wawasan umum yang disebut “analisis” (Ulber Silalahi, 2012: 339).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini dilakukan pembahasan dan analisis untuk menjawab Efektivitas Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam rangka menjaga kerukunan umat beragama di Jakarta Timur. Dalam penelitian ini metode penelitian deskriptif dengan pendekatan penelitian kualitatif yang dibahas dan di analisis berdasarkan indikator dengan menggunakan teori Efektivitas Organisasi menurut Duncan dalam Steers (2015) membahas terkait Efektivitas Organisasi yang akan disajikan berdasarkan 3 (tiga) indikator yaitu: 1) Pencapaian Tujuan, 2) Integrasi, 3) Adaptasi.

Efektivitas Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Rangka Menjaga Kerukunan Umat Beragama di Jakarta Timur

Pencapaian Tujuan

Suatu program dapat dievaluasi dengan efektivitas pelaksanaannya. Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 258 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta, Suku Badan mempunyai tugas mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis pelayanan penunjang pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang meliputi bina ideologi dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan, ketahanan ekonomi, seni, budaya, agama dan kemasyarakatan serta politik dan demokrasi. Dari tugas tersebut diketahui bahwa Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki kewajiban ikut serta menjaga, merawat dan menciptakan kerukunan hidup antar umat beragama. Salah satu indikator untuk mengetahui efektivitas organisasi adalah dengan mengetahui sejauhmana pencapaian tujuan dari Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam rangka menjaga kerukunan hidup antar umat beragama di Jakarta Timur.

Menurut Duncan dalam Steers (2015) “Pencapaian tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses”. Berdasarkan informasi yang diperoleh melalui observasi dan wawancara diketahui bahwa untuk mencapai tujuannya, Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sudah melakukan Langkah-langkah yang tepat, Kesbangpol mengadakan sosialisasi mengenai program pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan, edukasi dan penyuluhan ke sekolah-sekolah, turun langsung ke masyarakat dengan koordinasi melalui RT dan RW setempat. Kesbangpol juga melakukan pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan melalui seminar ilmiah pada komunitas kepemudaan lintas etnis dan agama baik yang diprogramkan oleh Kesbangpol maupun yang diinisiasi oleh organisasi kepemudaan. Sampai saat ini Langkah yang dilaksanakan tersebut sudah berjalan cukup efektif dengan kurun waktu pencapaian yang sesuai, sasaran yang tepat dan berdasarkan dasar hukum yang sudah ditetapkan.

Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik juga melakukan upaya peningkatan persatuan dan kesatuan bangsa dengan melaksanakan gerakan kampanye ataupun bentuk-bentuk advokasi lainnya secara serentak untuk meningkatkan komitmen yang utuh terhadap persatuan dan kesatuan bangsa, serta melaksanakan sosialisasi untuk meningkatkan rasa kebangsaan Indonesia. Selain itu dilakukan juga penguatan kelembagaan politik yang ditujukan untuk mewujudkan kelembagaan yang lebih kokoh dan optimalisasi fungsi-fungsi dan hubungan antar lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif, serta kemasyarakatan, sejalan dengan amanat konstitusi. Adapun pemulihan wilayah konflik, stabilitas politik dan pasca konflik merupakan agenda penting bagi upaya mewujudkan proses demokratisasi, persatuan dan kesatuan bangsa, iklim usaha yang kondusif serta terjaganya ketertiban umum di daerah.

Selain mengadakan program adanya beberapa permasalahan perlu diantisipasi terutama terkait dengan ekses yang potensial terjadi di beberapa daerah sebagai implikasinya. Peningkatan partisipasi politik masyarakat, dalam upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat, maka para stake holder (Partai Politik, organisasi kemasyarakatan, tokoh politik, tokoh masyarakat dan elemen masyarakat lainnya) diharapkan untuk berperan lebih aktif dalam memberikan pemahaman politik kepada masyarakat.

Peran penting kesbangpol dalam membangun kerukunan merupakan agenda nasional yang perlu dikerjakan oleh instansi pemerintah secara efektif dan efisien. Kesbangpol juga memiliki peran mengawasi dan memantau jangan sampai agama dimanipulasi serta dieskpoitasi untuk pembenaran bagi kepentingan sesaat politik praktis dan pragmatis dari partai politik (Kemenag, 2018). Peran kesbangpol dalam perspektif kerukunan beragama harus terarah dan bertujuan pada upaya menjaga agar setiap agama dilindungi dan dijaga sehingga

meminimalisir dan mencegah tindakan diskriminasi atau dikotori mayoritas dan minoritas dalam negara demokratis. Menurut Prof Jimly Asshiddiqie, dalam pidato pembukaan peringatan hari jadi ke-96 Majelis Tinggi Agama Khonghucu (Matakin) ia menegaskan bahwa, “setiap umat beragama harus mampu menjaga nilai-nilai kualitas dan integritas sebagai manusia karena setiap agama memiliki banyak persamaan, terutama terkait nilai-nilai universal, setiap agama sama-sama mengajarkan kepribadian dan iman” (Sulistiyo, 2019).

Dari uraian di atas diketahui bahwa pencapaian tujuan yang dilakukan oleh Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan serangkaian proses yang dilaksanakan dan dapat dilihat dari mulai tahap perencanaan yang matang, tahap pelaksanaan yang baik dan target yang diinginkan tercapai. Dengan demikian pencapaian tujuan sudah dinilai efektif sesuai dengan definisi pencapaian tujuan dari Duncan dalam Steers (2015), dimana pencapaian tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Hal ini sesuai pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Wulan Prsaetyaningrum (2022) dimana pada hasil penelitiannya menyatakan bahwa menurut konsep teori peran serta startegi komunikasi politik komunitas beragama, bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang telah berperan dalam upaya menjaga stabilitas kerukunan antara umat beragama di Kota Semarang dalam kurun waktu 2019-2021. Hal ini sesuai dengan peran Kesbangpol dalam menciptakan kebijakan kerukunan antar umat beragama.

Integrasi

Integrasi dilihat dari kemampuan integrasi program dalam menyelaraskan sikap/perilaku stake holder. Kemampuan program menjadi wadah untuk mewujudkan berbagai aspirasi masyarakat Kemampuan program sebagai simpul kerjasama berbagai pihak. Selain itu, integrasi juga dapat dilihat dari kemampuan program menjadi wadah untuk mewujudkan berbagai aspirasi masyarakat dan kemampuan program sebagai simpul kerjasama berbagai pihak yang peduli terhadap pemberdayaan masyarakat dan penataan lingkungan dan infrastruktur. Kemampuan integrasi program pada tahapan sosialisasi dapat diamati dari tercapainya partisipasi stake holder dan keterlibatan unsur-unsur masyarakat dalam tahapan sosialisasi. Dalam melakukan sosialisasi Kesbangpol berperan aktif dalam setiap kegiatan keagamaan dari berbagai agama yang ada di wilayah Jakarta Timur, dengan begitu masyarakat akan lebih merasa diperhatikan khususnya bagi kaum minoritas.

Dalam melakukan sosialisasi mengenai program kerukunan umat beragama di wilayah Jakarta Timur Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan kegiatan berkala dan berkelanjutan dalam bentuk sosialisasi yang berkaitan dengan menjaga dan merawat kerukunan hidup umat beragama, secara sistematis dan komprehensif menjangkau seluruh stakeholder

serta terus menjaga dan memelihara komunikasi dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, LSM, ORMAS, perangkat RT/RW, melakukan kampanye, himbauan dan terlibat gerakan mandiri merawat dan menjaga kerukunan beragama ditengah masyarakat, serta memberi perhatian khusus terhadap edukasi dan kepedulian generasi muda terhadap isu pentingnya kerukunan umat beragama dalam kehidupan sehari-hari.

Kemampuan integrasi ini sudah dapat dijalankan oleh Kesbangpol dalam memandu masyarakat, partai politik, ormas dan tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat melalui pendekatan atau strategi kemitraan bersama instansi-instansi terkait dan semua lembaga pemerintahan daerah sehingga mampu meredam konflik berbau SARA dan menjaga stabilitas keamanan, kedamaian dan kerukunan dalam masyarakat. Meskipun dalam beberapa peran dan tugas belum maksimal mewujudkan tujuan bersama secara progresif. Secara skematis peran keseimbangan badan Kesbangpol dapat tergambar pada skema kerangka konseptual peran keseimbangan Kesbangpol dalam membangun kerukunan masyarakat.

Adanya beberapa konflik yang masih terjadi di Jakarta Timur menunjukkan bahwa kemampuan integrasi Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik masih belum cukup efektif, dimana menurut Duncan dalam Steers (2015) integrasi adalah pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik masih belum efektif menangkal isu SARA yang terjadi, artinya sosialisasi yang dilakukan masih perlu ditingkatkan lagi. Hal ini senada dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yohanes (2023), dimana dari hasil penelitiannya diketahui bahwa peran membina kehidupan demokrasi dan keberagaman sosial, Badan Kesbangpol masih belum efektif karena ketidakmampuan Kesbangpol mencegah terjadinya konflik politik dan SARA di tahun 2019-2021.

Adaptasi

Kemampuan adaptasi dan kemampuan antisipasi terhadap segala kemungkinan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat telah dilakukan oleh Suku Badan Kesbangpol melalui penguatan kerjasama dan kolaborasi lintas instansi dan lembaga, bersama masyarakat. Suku Badan kesbangpol melakukan penguatan kerjasama dan kolaborasi lintas instansi dan lembaga, bersama masyarakat dalam menjaga dan mengawasi pemilu maupun pengawasan terhadap orang asing dan lembaga asing yang masuk ke wilayah Jakarta Timur. Mengawasi dan memperketat serta membina dan menguatkan ideologi dan wawasan kebangsaan melalui pemerataan pembangunan, peningkatan ekonomi, dan memperketat fungsi pengawasan terhadap berbagai pengaruh asing maupun penyelundupan barang, manusia dan narkoba atau

kejahatan lainnya. Selain itu Suku Badan Kesbangpol juga melakukan pendampingan terhadap berbagai permasalahan yang terjadi pada masyarakat di wilayah Jakarta Timur.

Dalam mewujudkan harmoni sosial masyarakat, Pemerintah berupaya meningkatkan berbagai perangkat perundang-undangan/ Peraturan yang dapat mewujudkan persatuan dan kesatuan masyarakat. Peraturan-peraturan tersebut baik terkait dengan program dan kegiatan maupun forum-forum masyarakat maupun instansi terkait yang membawa konsekuensi ke daerah untuk memfasilitasi kebijakan tersebut. Peraturan-peraturan tersebut antara lain pembentukan tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Pokja Indeks Demokrasi Indonesia (Pokja IDI), Forum Koordinasi Penanggulangan Terorisme (FKPT).

Salah satu konflik yang pernah terjadi yaitu mengenai alih fungsi lahan yang terjadi pada Yayasan Bahtera Sejahtera. Permasalahan ini berawal pada tahun 1990 dimana Yayasan Bahtera Sejahtera membeli tanah fasum dari PD. Pembangunan Sarana Jaya dan selanjutnya mengajukan Izin Membangun Tempat Peribadatan kepada Walikota Administrasi Jakarta Timur, namun tidak bisa terlaksana karena adanya Surat Keterangan Keberatan Warga atas pembangunan dimaksud. Yayasan Bahtera Sejahtera memperoleh IMB No. 4474/IMB/1995 atas tanah tersebut untuk mendirikan bangunan Sekolah Taman Kanak-Kanak, yang pada waktu selanjutnya gedung Sekolah TK tersebut dialih fungsikan menjadi Tempat Peribadatan/ Gereja Presbyterian Indonesia Jemaat Solo Gratia. Walikota Administrasi Jakarta Timur telah mengeluarkan surat pemberitahuan untuk penghentian penggunaan kegiatan di Gedung TK. Yayasan Bahtera yang tidak sesuai peruntukannya (No. 158/1.758.3 tanggal 19 Januari 2004). Sejak 2004 kegiatan di lokasi tersebut sudah vakum. Perwakilan warga meminta kepada Lurah Pondok Kelapa untuk segera mengambil tindakan, agar kegiatan peribadatan yang meresahkan warga tersebut tidak memicu permasalahan lebih lanjut, karena Pengurus Gereja telah melibatkan oknum Ormas sebagai pengamanan pada saat melakukan peribadatan, sehingga warga merasa terintimidasi dengan hal tersebut

Dengan terjadinya konflik tersebut, tindakan nyata yang dilakukan oleh Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi Jakarta Timur beserta Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yaitu dengan mengadakan Rapat Koordinasi pada Jum'at (30 April 2021) yang melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan seperti Lurah, Danramil, Kapolsek, Intelkam, Perwakilan Bagian Hukum, Kanwil Kementerian Agama Pembimas Kristen Kota Adm. Jakarta Timur, Ketua LMK Kel. Pondok Kelapa, FKUB Jakarta Timur (Ketua dan Koord. Bidang Kristen), Perwakilan warga RT. 009/ RW. 011 Kelurahan Pondok Kelapa. Suku

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi Jakarta Timur menyampaikan dalam rapat yaitu: hendaknya Pimpinan Wilayah dalam hal ini Camat dan Lurah mengambil sikap dengan lebih dulu memastikan kekuatan dan kepastian hukum atas legalitas keberadaan Gereja tersebut, karena seperti kita ketahui bersama bahwa IMB bangunan tersebut yang dibuat pada tahun 1996 adalah sebagai bangunan gedung Sekolah TK, bukan Gereja (Rumah Ibadah); bila belum ada Izin Prinsip pendirian Gereja yang dikeluarkan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta, berarti yang dilakukan di tempat tersebut adalah ilegal/ tidak sesuai peruntukannya; Informasi adanya Ormas yang menjadi backing (Pemuda Batak Bersatu dan Pemuda Pancasila) akan ditindak lanjuti dengan pemanggilan untuk klarifikasi. Konflik tersebut sampai saat ini masih dalam proses, walaupun telah mendapatkan persetujuan dari FKUB Kota Jakarta Timur dan Kanwil Kemenag Jakarta Timur akan tetapi masih dalam tahap menunggu persetujuan dari FKUB Provinsi DKI Jakarta (Kepala Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi Jakarta Timur, April 2024).

Dari penjelasan di atas mengenai indikator adaptasi diketahui bahwa kemampuan adaptasi Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jakarta Timur dinilai sudah efektif, hal ini sesuai dengan definisi adaptasi dalam pengukuran efektivitas organisasi menurut Duncan dalam Steers (2015) adaptasi adalah pengukuran bagaimana sebuah organisasi mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kemampuan adaptasi merupakan kemampuan untuk mengubah atau menyelaraskan prosedur standar operasinya secara dinamis apabila lingkungannya mengalami perubahan. Artinya Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jakarta Timur sudah mampu menyelaraskan berbagai perubahan yang terjadi di masyarakat. Hal ini senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Henrikus Wawan Kurniawan (2017), dimana hasil penelitiannya yaitu peranan pemerintah kota Yogyakarta dalam memelihara kerukunan umat beragama meliputi; a) sebagai fasilitator, pemerintah memberdayakan dan memfasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan memfasilitasi pelajar, mahasiswa, organisasi kemasyarakatan serta tokoh agama dalam program pemantapan cinta tanah air dan nasionalisme. B) sebagai koordinator, pemerintah menyelenggarakan rapat koordinasi dengan FKUB, pengkoordinasian dengan instansi vertikal pemerintahan, pembinaan dan pengkoordinasian camat dan lurah dalam musyawarah rencana pembangunan (Musrembang) serta koordinasi terkait penyelesaian konflik. C) regulator, pemerintah menerbitkan surat izin mendirikan bangunan rumah ibadah sesuai dengan rekomendasi FKUB.

Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Rangka Menjaga Kerukunan Umat Beragama di Jakarta Timur

Dalam pelaksanaan program untuk mewujudkan kerukunan umat beragama di Jakarta Timur, diketahui bahwa terdapat beberapa faktor pendukung maupun faktor penghambat dalam pelaksanaannya. Berikut adalah faktor pendukung Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jakarta Timur dalam menjaga kerukunan umat beragama:

a. Anggaran

Anggaran dari pemerintah bagi Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan hal yang penting, pelaksanaan program dapat berjalan dengan baik jika ada anggaran yang mencukupi

b. Sarana dan prasarana

Dalam menjalankan suatu program diperlukan sarana dan prasarana pendukung.

c. Dukungan instansi (TNI/ POLRI)

Dukungan dari aparat keamanan di wilayah Jakarta Timur. Polres Jakarta Timur dan seluruh jajaran Polsek se Jakarta Timur dan juga TNI.

d. Apresiasi dari seluruh stake holder termasuk tokoh agama

Dukungan dari tokoh lintas agama, tokoh masyarakat, organisasi agama, organisasi masyarakat, LSM, budayawan dan warga yang memiliki kepedulian terhadap pentingnya merawat kerukunan hidup antar umat beragama di wilayah masing-masing.

e. Adanya kesatuan serta persaudaraan internal umat beragama, antarumat beragama, serta antara umat beragama dengan pemerintah;

f. Adanya visi dan misi bersama tentang pembinaan kerukunan hidup beragama yang lebih dinamis di masa depan, khususnya untuk peningkatan kerjasama nyata dalam menanggulangi masalah-masalah hubungan antarumat beragama;

g. Adanya wadah silaturahmi untuk menjunjung tinggi prinsip- prinsip kebersamaan yang mendukung terciptanya suasana lebih rukun dan harmonis.

h. Tingkat pendidikan masyarakat sangat berpengaruh terhadap kesadaran masyarakat akan pentingnya kerukunan hidup antar umat beragama dan memiliki sikap toleransi.

i. SDM dari Kesbangpol yaitu kemampuan Kesbangpol dalam memfasilitasi semua aspirasi masyarakat yang berkaitan dengan kerukunan hidup antar umat beragama, kegiatan yang pro masyarakat

Sedangkan yang menjadi faktor penghambat antara lain:

1. Arus globalisasi yang semakin tidak terkendali dapat menghambat dalam mewujudkan kerukunan hidup beragama, dengan menyebarnya berita-berita bohong/ hoax membuat masyarakat mudah terprofokasi dan akan menyebabkan perpecahan dalam masyarakat.
2. Wawasan kebangsaan masyarakat yang menipis, ini dapat pula disebabkan oleh perkembangan yang cepat yang membuat masyarakat menjadi manusia individualis yang tidak memahami pentingnya toleransi dalam bermasyarakat serta hidup rukun antar umat beragama.
3. Sekelompok atau oknum tertentu ditengah masyarakat yang belum teredukasi dengan baik serta belum memahami sepenuhnya tentang pentingnya toleransi antar umat beragama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
4. Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap program-program yang diselenggarakan menjadi salah satu faktor pengambat dalam mewujudkan masyarakat hidup rukun.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Efektivitas Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam rangka menjaga kerukunan umat beragama di Jakarta Timur, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Efektivitas Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik masih dapat dikatakan belum efektif. Hal ini dikarenakan ketiga indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas ini belum sepenuhnya tercapai. Ketiga indikator tersebut yaitu pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi. Pencapaian tujuan yang dilakukan oleh Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat dikatakan sudah efektif karena melalui serangkaian proses dalam pencapaian tujuan. Pada indikator integrasi masih kurang efektif, hal ini dapat diketahui terjadinya beberapa konflik yang masih terjadi di Jakarta Timur. Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik masih belum efektif menangkal isu SARA yang terjadi, artinya sosialisasi yang dilakukan masih perlu ditingkatkan lagi. Pada indikator adaptasi, diketahui bahwa Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jakarta Timur sudah mampu menyelaraskan berbagai perubahan yang terjadi di masyarakat, artinya indikator adaptasi ini sudah dapat dikatakan efektif.
- b. Masih terdapat berbagai hambatan yang terjadi pada masyarakat Jakarta Timur, diantaranya arus globalisasi yang begitu tidak terkendali membuat masyarakat kehilangan rasa peduli akan lingkungan sekitarnya, sehingga terkadang menjadi kendala

untuk mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat ketika mengadakan program dalam rangka menjaga kerukunan hidup umat beragama. Selain itu semangat wawasan kebangsaan di kalangan generasi muda kecenderungannya mulai mengikis sebagai dampak masuknya arus globalisasi dan budaya luar yang sulit di bendung melalui dunia digital sehingga munculnya berita-berita hoax yang cepat tersebar di masyarakat. Adapun faktor pendukung mewujudkan kerukunan hidup beragama adalah dukungan Anggaran pada APBD Pemprov DKI Jakarta, dukungan fasilitas sarana dan prasarana bagi suku Badan Kesbangpol Jakarta Timur, dan dukungan aparat keamanan (TNI/POLRI), dukungan dari tokoh lintas agama, tokoh masyarakat, organisasi agama, organisasi masyarakat, LSM, budayawan dan warga yang memiliki kepedulian terhadap pentingnya merawat kerukunan hidup antar umat beragama di wilayah masing-masing

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diberikan saran agar dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh pihak Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jakarta Timur yaitu sebagai berikut:

- a. Proses integrasi yang dilakukan dapat ditingkatkan melalui komunikasi yang lebih intensif yang dapat dilakukan dengan tokoh masyarakat, tokoh agama dan seluruh lapisan masyarakat guna menjaga kerukunan hidup beragama, selain itu dapat dilakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat mengenai syarat-syarat pendirian tempat ibadah agar konflik alih fungsi lahan menjadi tempat ibadah tidak terjadi lagi dikemudian hari.
- b. Untuk meningkatkan kemampuan integrasi juga dapat dilakukan dengan melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia di lingkungan internal dan eksternal yakni ormas beserta masyarakat beragama yang tergabung dalam Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) melalui pelatihan maupun program yang diselenggarakan oleh Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- c. Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan FKUB Jakarta Timur bersama masyarakat beragama lainnya mengandeng dan memberikan pengakuan terhadap masyarakat beragama maupun berkepercayaan yang masih minoritas di Jakarta Timur, agar masyarakat beragama atau berkepercayaan yang masih minoritas tersebut tidak merasa terkucilkan dari masyarakat mayoritas, dengan demikian isu SARA dan konflik mengenai kerukunan antar umat beragama dapat diatasi bersama – sama.

REFERENSI

Buku

- Abu Bakar. 2015. *Konsep Toleransi dan Bebas Beragama*. Jurnal Toleransi: Media Komunikasi Umat Beragama, Vol. 7 No 2, Juli-Desember 2015.
- Ahmad Subakir. 2020. *Role Model Kerukunan Umat Beragama di Indonesia*. CV. Cendekia Press
- Ambarwati, A. 2019. *Perilaku dan Teori Organisasi*. Media Nusa Creative.
- Davis., K. 1962. *Human Relations*. Mc Graw-Hill.
- Duncan, R. 1981. *Multiple DecisionMaking Structures in Adapting to Environmental Uncertainty: The Impact on Organizational Effectiveness*. Human Relations, 26(3), 273–291.
- Firdaus Arifin. 2019. *Hak Asasi Manusia: Teori, Perkembangan dan Pengaturan*. Yogyakarta: Penerbit Thafa Media.
- Gibson, J. L., Ivancevixh, J. M., & Donnelly, J. H. 1985. *Organisasi* (1st ed.). Erlangga
- Güçlü Sözer, E. 2019. *Electronic Word of Mouth (e-WoM): Is it an Effective Tool for ReVitalizing the Relationship between a Brand and Its ExCustomers*. Journal of Business Research - Turk, 10(4), 97–114. <https://doi.org/10.20491/isarder.2018.514>
- Ismail, F. 2019. *Dinamika Kerukunan Antar Umat Beragama*. PT. Remaja Rosda Karya.
- Pasolong, H. 2013. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfa Beta
- M. Ali dkk. 2016. *Islam untuk Disiplin Ilmu Hukum Sosial dan Politik*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Ritzer, G., & Goodman, D. J. 2010. *Teori Sosiologi Modern* (ke-6). Kencana
- Sugiyono. 2019. *Metode penelitian kuantitatif, kuantitatif R & D*. Cetakan ke 1 Bandung: CV. Alfabeta.
- Scott., W. 1961. *Organization Theory: An Overview and A Appraisal*. The Journal of the Academy of Management, 4(1), 7–26.
- Steers, R. 1975. *Problem In The Measurements Of Organizational Effectiveness*. Administrative Science Quarterly, 20(4), 546-558.
- Steers. 2015. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfa Beta.
- Sutton, Margaret. 2016. *Nilai dalam Pelaksanaan Demokrasi*. Vol. 2, No. 1
- Syukron, B. 2017. *Agama dalam Pusaran Konflik: Studi Analisis Resolusi Terhadap Munculnya Kekerasan Sosial Berbasis Agama di Indonesia*. RI'YAH, 2(1).

Jurnal/ Penelitian

- Alfi Nurfajri. 2023. *Peran Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Pembinaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Kota Administrasi Jakarta Utara Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta*. Jakarta: IPDN.
<http://eprints.ipdn.ac.id/14404/1/Alfi%20Repository.pdf>
- Arif Gunawan Santoso. 2022. *Analisis Indeks Kerukunan Umat Beragama di Provinsi Kalimantan Barat*. Vol. 28, 2 (Desember, 2022), hlm. 70-84 p-ISSN: 1412-1697 e-ISSN: 2477-3816, DOI: 10.19109/intizar.v28i2.1411.
<https://doi.org/10.19109/intizar.v28i2.14113>
- Henrikus Wawan Kurniawan. 2017. *Peranan Pemerintah Kota Yogyakarta Dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama*. Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta.
<https://eprints.uny.ac.id/53167/5/Ringkasan%20Skripsi%2013401241032.pdf>
- Nur Faiqoh. 2015. *Implementasi Pendidikan Berbasis Multikultural Sebagai Upaya Penguatan Nilai Karakter Kejujuran, Toleransi, dan Cinta Damai pada Anak Usia Dini Di Kiddy Care, Kota Tegal*. Under Graduates Thesis. Universitas Negeri Semarang.
- Wulan Prasetyaningrum. 2022. *Peran Badan Kesbangpol Kota Semarang Dalam Menjaga Stabilitas Kerukunan Antar Umat Beragama di Kota Semarang Tahun 2019-2021*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/20209/1/Skripsi_1806016015_Wulan_Prasetyaningrum.pdf
- Yohanes. 2023. *Analisis Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Merawat Kerukunan Masyarakat di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat*. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP). JIAP Vol 9, No 2, pp 116-125.
<https://jiap.ub.ac.id/index.php/jiap/article/view/1486>

Peraturan/ Undang-undang

- Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 559 Tahun 2021 *Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 1271 Tahun 2019 Tentang Pengukuhan Kepengurusan Forum Kerukunan Umat Beragama Periode Tahun 2019 – 2024*.
- Keputusan Pengurus Harian Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor: 02/Fkub-Jt/Kep/I/2022 *Tentang Penetapan Perubahan Ketiga Struktur Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Administrasi Jakarta Timur Periode Tahun 2019-2024 Paw Tahun 2022*
- Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 170 Tahun 2009 *Tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Forum Kerukunan Umat Beragama*.

Internet

- Purwo Handoko (2020). <https://kesbangpol.gunungkidulkab.go.id/berita-334/peran-pemerintah-daerah-dalam-pemeliharaan--kerukunan-umat-beragama-.html>